

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku/Jurnal:

Arjunaawal,putra,Muhamad, skripsi, *Kedudukan Hukum Kepala Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah.*

AshidiqieJimly, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*( Jakarta: raja grafindo Nusantara 2009).

AsshiddiqieJimly, *Konsitusi-Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi*(Jakarta :Konstitusi Press 2005).

Bintan R. Siragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988)

Farida,Rida, *Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya dalam Konsep Perwakilan Rakyat* (JurnalCitaHukum : 2013),

Huda,Ni'matul, *Praktek Recall Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta : 15 April 2011).

IlmarAminudin, *Hukum Tata Pemerintahan*(Jakarta :Kencana, 2014)

Jurdi,Fajlurrahman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta :Kencana, 2019)

Ndraha,Talidziduhu, *Metodelogi Ilmu Pemerintahan*, (Yogyakarta : RinekaCipta, 2011).

Marijan,Kacung, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, (Jakarta:kencanaprenada media grup 2010).

- Mahmud marzuki peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Media Grup ,2005).
- Nurul,Qamar, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (rechtssat of machtsaat)*, (Makasar: CV.Social Politic Genius, 2018)
- O.B.E,Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern , Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*(Bandung : penerbitnusa media 2009).
- Redi,Ahmad, *Hukum Pembentukan Perundang-Undangan*, (Jakarta: SinarGrafika, 2018)
- Soekarto,Soejarto& srimamudji, *Penelitian Hukum Normative(Suatu Tinjauan Singkat)*,(Jakarta :RajawaliPers 2001).
- Syahroni Tubagus, *Kewenangan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam Pembentukan Perda Keagamaan*, (Skripsi Program StudiHukum Tata Negara, UIN SMH BANTEN, Serang 2017).
- Ubaedillah,Ahmad, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi* (Jakarta :prenadamedia group 2015).
- Sari,Herlina, *Wajah Demokrasi Indonesi*, (Bandung :Lemah Media Pustaka, 2019)
- Sirajudin, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah* (Malang :Setara Press, 2016)
- Supriyadi,Hari, *Penyelesaian Sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Pontianak (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa PAW Anggota DPRD Kab.Pontianak)*.

## **B. Undang-undang**

Lihat pasal 1 undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang pemilihan umum.

Lihatpp No 33 Tahun 2018 tentang tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Lihat UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

PP No. 33/2018 Tentang Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Lihat Dissenting Opinion Abdul Mukhtie Fadjar dalam Putusan MK RI No. 008/PUU-IV/2006.

Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN.

## **C. WebsitedanJurnal**

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), mempertanyakan hegemoni recall anggota DPRD di tangan partai politik , di akses pada 21 januari 2019.

[www.brainly.co.id](http://www.brainly.co.id), salah satu fungsi Negara hukum (diakses pada tanggal 07 Desember 2019)

[www.wikipedia.go.id](http://www.wikipedia.go.id), *Demokrasi Dan Bentuk Pemerintahan*, (di akses pada tanggal 20 April 2019)

[istilahukum.wordpress.com](http://istilahukum.wordpress.com) *Penyalahgunaan Wewenang*, Di Akses Pada 26 September 2012.

[Www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org) *Kepala Pemerintahan Tingkat Provinsi*, di akses pada 24 Juni 2018.

PrihaningtiaWilda, *Fungsi Gubernur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (AerlanggaDepelopmentJurnal)*

[Www.negarahukum.com](http://www.negarahukum.com), *Pergantian Antar Waktu Negara Hukum*, di akses pada 14 November 2011.

Fauziyah, *Mekanisme Pergantian Antar Waktu*, [jurnal.unmuhjember.ac.id](http://jurnal.unmuhjember.ac.id), di akses pada (tahun 2017).

<http://www.hukumonline.com> *Mempertanyakan Hegemoni Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR di Tangan Partai Politik*, Di Akses Pada (19 Desember 2011).

[www.kabarbanten.com](http://www.kabarbanten.com) *Pindah Partai Anggota DPRD Kota Cilegon Terancam PAW*, Di Akses pada (17 Juli 2019).

[www.detik.com](http://www.detik.com) *Daftar Anggota DPR Yang Kena PAW Di Akses Pada* (20 Maret 2019).

Lihat Pasal 146 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Tentang Perbedaan Keputusan Dengan Peraturan*, Di Akses Pada (13 Januari 2012)

Lihat UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Lihat UU No.22 tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Dan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Lihat Dissenting Opinion Abdul Mukhtie Fadjar dalam Putusan MK RI No. 008/PUU-IV/2006.

Jurnal Negara Hukum, *Tentang Penggantian Antar Waktu*, Di Akses Pada (25 Oktober 2015).